

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basuki, Sulisty, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- , 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Har, Ter, 2011, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat (Terjemahan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartasapoetr, asapoetra, R.G, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendencygunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Margono, S, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

- Perangin, Effendi, 1994, *Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rianto, Adi, 2004 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2013 *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan.
- Samsul, Inosentius, 2013, *Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika*, Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Mempelajari Hukum Adat edisi III*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , (A), 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , (B), 2012, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Cet.1, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1982, *Aneka Masalah Hukum Agraria*, Puspita Serangkum, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriyadi, Bambang, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan; Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Titahelu, Z Ronal, 2015, *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoritik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia)* Ed. Revisi, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Utomo, Laksanto, 2017, *Hukum Adat*, Ed.1-Cet.2, Rajawali Pers, Depok.

Warman, Kurnia, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia (Pengantar)*, Epistima Institute, Jakarta.

Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Makalah/Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi/Internet

Agnesia Lia. dan Hari Supriyanto, “Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Suku Dayak Tunjung Benua Di Kabupaten Kutai barat Provinsi Kalimantan Timur Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto/KBPN Nomor 5 Tahun 1999”, *Jurnal Hukum Adat* Vol. 1, No.1, Januari 2015.

Arman, Muhammad, “Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan MK. 35/PUU-X/2012”, *Makalah*, disampaikan pada pertemuan Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyaraakt Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 2 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Universitas Pancasila, Jakarta, 2016.

Arsenius, “Pengaturan Mengenai Hutan Adat dan Implementasinya di Kepulauan Mentawai”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Cahyaningrum, Dian, ” Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenal Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak ”, *Jurnal Kajian*, Vol. 20 No. 1 Maret 2015.

Gayo, Ahyar Ari, “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*, Volume 18 No. 3, 2018.

Hairan, “Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Prespektif Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Hukum Prespektif*, Vol. 9 No. 2. Oktober 2016.

Hanung, Septya Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat”, *Jurnal Hukum Legislatif*, Vol. 4 No. 1. Desember 2020.

Harsono, Boedi dalam Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, “Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Laporan Hasil Penelitian*, Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2009.

Laturette, Adonia, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat”, *Jurnal Sasi*, Vol 7 No 3, November 2011.

Massen C.C.J. dan A.P.G. Hens sebagaimana dikutip Eddy Ruchijat dalam Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana, “Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Laporan Hasil Penelitian* Kerjasama Universitas Nusa Cendana dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kupang, 2009.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Murtitomo Satriyo, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Penguasaan Sengketa Penguasaan Tanah Di atas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.

Maya Ria Sari, “Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Mulawarman Law Review*, Vol. 6 No. 1, Juni 2021, hlm. 9.

Safitri., A. Myrna dan Luluk Uliyah. “Adat di tangan Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, September 2020.

Salam Safrin, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat”. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2. Agustus, 2016.

Sumardjono, Maria S.W., “Pengakuan Hak Ulayat Yang komodatif”, *Makalah*, Disampaikan sebagai Pengantar pada FGD “Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengakuan dan Pendaftarannya.”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Widajanto Ruddy, “Pengaruh Undang-Undang Normo 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan Jati Genderah Kabupaten Sumedang” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

Wiyono Bambang, “Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 6 Nomor 1 Juli 2019.

Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca amandemen,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22, Nomor 3, Oktober 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak.

SK.656/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2016 tentang penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak.